

# HARMONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

## A. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang pasal 33 Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antarkabupaten/kota.

Kualitas Perencanaan menjadi salah satu indikator terpenting untuk mengukur kemajuan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan di daerah. Bagaimana dengan kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten? Indikator kemajuan kualitas pembangunan Provinsi Banten dari tahun ke tahun dikatakan menunjukkan perbaikan, Sarana dan fasilitas umum mengalami peningkatan, baik fisik maupun non fisik yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang dan sesuai dengan Urusan dan kewenangannya, terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah maupun pemerintah daerah berperan sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*), dimana perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut, yang saat ini sering disebut dengan kearifan lokal.

Dalam Perencanaan pembangunan harus didasari oleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Hal ini sejalan dengan beberapa peraturan baru yang harus diterapkan di daerah dimana terdapat beberapa penyesuaian pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-3708 dengan tujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang

berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

## B. Prioritas Pembangunan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5%-5,5% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2%-9,7%, IPM menjadi 72,78-72,90, Gini rasio pada kisaran 0,377-0,379, tingkat pengangguran terbuka 7,5%-8,2%;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 3,9%-5,1%, **Jawa-Bali 4,8%-5,5%**, Kalimantan 3,6%-5,7%, Sulawesi 5,4%-7,0%, Nusa Tenggara 3,5%-5,2%, Maluku 5,2%-6,2%; dan Papua 2,6%- 5,8%.

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 UndangUndang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua UndangUndang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya Tema Pemerintah Provinsi Banten adalah **“Akselerasi Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemantapan Infrastruktur”**, yang dijabarkan kedalam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi melalui pemantapan 8 (delapan) area perubahan (Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik);
2. Penguatan Daya Saing Perekonomian;
3. Penguatan interkonektivitas melalui Pembangunan Infrastruktur;

### C. HASIL KAJIAN

#### SINKRONISASI PRIORITAS PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI BANTEN DENGAN PRIORITAS NASIONAL

NO	PRIORITAS NASIONAL	KOTA TANGERANG SELATAN		KOTA SERANG		KOTA CILEGON		KOTA TANGERANG	
		Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	%	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	%	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	%	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	%
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	80.430.742.327,00	2,48	23.416.281.879,00	2,02	6.769.988.009,00	3,9	149,427,572,388.00	3.44
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1.371.592.374.201,00	42,37	1.925.224.647,00	0,17	71.595.384,00	0,04	-	-
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	466.051.341.192,00	14,40	212.207.371.111,00	18,27	60.234.859.479,00	34,69	1,704,372,063,396.00	39.27
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	660.245.084.230,00	20,39	86.736.291.091,00	7,47	1.034.789.047,00	0,60	-	-
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	241.284.281.879,00	7,45	194.402.998.386,00	16,74	7.189.496.544,00	4,14	905,664,605,322.75	20.87
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	273.862.176.087,00	8,46	40.146.381.442,00	3,46	1.151.520.046,00	0,66	220,878,312,216.00	5.09
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	80.430.742.327,00	2,48	602.778.715.769,00	51,89	97.199.650.253,00	55,97	1,360,087,168,686.00	31.34
	<b>TOTAL</b>	<b>3.237.504.702.689,00</b>	<b>100</b>	<b>1.161.613.264.325,00</b>	<b>100</b>	<b>173.651.898.762,00</b>	<b>100</b>	<b>4,340,429,722,008.75</b>	<b>100</b>

**SINKRONISASI PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN DI PROVINSI BANTEN DENGAN PRIORITAS NASIONAL**

NO	PRIORITAS NASIONAL	KABUPATEN TANGERANG		KABUPATEN SERANG		KABUPATEN PANDEGLANG		KABUPATEN LEBAK	
		Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	%	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	%	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	%	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	%
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	816.783.737.956,00	14,58	23.548.711.553,00	0,77	59.138.760.900,00	2,44	91.321.563.319,00	3,38
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	987.272.267.296,00	17,62	57.476.981.020,00	1,88	10.062.741.000,00	0,41	0,00	0,00
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.896.114.775.942,00	33,85	250.232.583.359,00	8,18	295.570.895.856,00	12,19	385.805.994.182,00	14,29
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	34.250.880.200,00	0,61	10.305.873.228,00	0,34	8.680.106.501,00	0,36	1.773.445.105,00	0,07
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	903.873.489.019,00	16,14	444.724.214.380,00	14,54	138.372.139.566,00	5,70	268.749.342.037,00	9,95
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	98.600.723.789,00	1,76	84.122.677.415,00	2,75	22.970.841.971,00	0,95	28.519.096.225,00	1,06
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	864.663.329.083,00	15,44	2.187.874.446.706,00	71,54	1.890.759.174.535,00	77,95	1.923.924.849.496,00	71,25
	<b>TOTAL</b>	<b>5.601.559.203.285,00</b>	<b>100</b>	<b>3.058.285.487.661,00</b>	<b>100</b>	<b>2.425.554.660.329,00</b>	<b>100</b>	<b>2.700.094.290.364,00</b>	<b>100</b>

**SINKRONISASI PRIORITAS PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI BANTEN DENGAN PRIORITAS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

NO	PRIORITAS PROVINSI BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN		KOTA SERANG		KOTA CILEGON		KOTA TANGERANG	
		Alokasi Belanja Dalam Rancangan APBD	Anggaran Dalam Rancangan APBD %	Alokasi Belanja Dalam Rancangan APBD	Anggaran Dalam Rancangan APBD %	Alokasi Belanja Dalam Rancangan APBD	Anggaran Dalam Rancangan APBD %	Alokasi Belanja Dalam Rancangan APBD	Anggaran Dalam Rancangan APBD %
1.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pembangunan akses & mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan life skill	1.371.592.374.201,00	42,37	318.454.344.831,00	27,41	555.294.496.720,00	46,09	1.704.372.063.396.00	39.27
2.	Penguatan Interkonektivitas melalui pembangunan infrastruktur	933.256.969.601,00	28,83	3.905.599.250,00	0,34	178.460.994.248,00	14,81	1.126.542.917.538.75	25.95
3.	Penguatan Daya Saing Perekonomian	144.038.702.773,00	4,45	236.474.604.475,00	20,36	38.447.366.966,00	3,19	149.427.572.388.00	3.44
4.	Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 (Delapan) Area Perubahan (Manajemen Perubahan, Panataan Peraturan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM , Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	788.616.656.114,00	24,36	602.778.715.769,00	51,89	432.579.477.624,00	35,91	1.360.087.168.686.00	31.34
	<b>TOTAL</b>	<b>3.237.504.702.689,00</b>	<b>100</b>	<b>1.161.613.264.325,00</b>	<b>100</b>	<b>1.204.782.335.558,00</b>	<b>100</b>	<b>4,340,429,722,008.75</b>	<b>100</b>

**SINKRONISASI PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN DI PROVINSI BANTEN DENGAN PRIORITAS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

NO	PRIORITAS PROVINSI BANTEN	KABUPATEN TANGERANG		KABUPATEN SERANG		KABUPATEN PANDEGLANG		KABUPATEN LEBAK	
		Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	%	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	%	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	%	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	%
1.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pembangunan akses & mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan life skill	2.539.120.144.872,00	45,33	1.424.626.368.680,00	46,58	306.384.439.057,00	12,63	387.415.296.192,00	14,35
2.	Penguatan Interkonektivitas melalui pembangunan infrastruktur	987.272.267.296,00	17,62	555.086.459.035,00	18,15	148.434.880.566,00	6,12	297.268.438.262,00	11,01
3.	Penguatan Daya Saing Perekonomian	816.783.737.956,00	14,58	96.156.613.860,00	3,14	59.821.160.900,00	2,47	91.485.706.414,00	3,39
4.	Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 (Delapan) Area Perubahan (Manajemen Perubahan, Panataan Peraturan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM , Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	1.258.383.053.161,00	22,46	982.416.046.086,00	32,12	1.910.914.179.806,00	78,78	1.923.924.849.496,00	71,25
	<b>TOTAL</b>	<b>5.601.559.203.285,00</b>	<b>100</b>	<b>3.058.285.487.661,00</b>	<b>100</b>	<b>2.425.554.660.329,00</b>	<b>100</b>	<b>2.700.094.290.364,00</b>	<b>100</b>

1. Alokasi anggaran untuk mendukung Prioritas Nasional pada Prioritas **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**, dimana diperlukan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi *covid-19*, pada Rancangan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021 hanya 1 (satu) Kabupaten yang alokasi anggarannya cukup memadai yaitu Kabupaten Tangerang sebesar Rp816.783.737.956,00 atau sebesar 14.58% dari total R.APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2021, sedangkan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang lain masih belum memadai dalam mengalokasikan anggarannya, bahkan ada yang kurang dari 1%. Hal ini belum sesuai dengan arahan Kebijakan Pusat yang tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah yang menekankan pada pemulihan ekonomi dan reformasi sosial sehingga intervensi melalui program dan kegiatan diharapkan dapat mengoptimalkan terhadap kontribusi pencapaian LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi).
2. Alokasi anggaran untuk mendukung Prioritas Provinsi **Penguatan Daya Saing Perekonomian** dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi *covid-19* dalam Rancangan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021 hanya 1 (satu) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang alokasi anggarannya cukup memadai yaitu Kabupaten Tangerang sebesar Rp816.783.737.956,00 atau sebesar 14.58% dari total R.APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2021 dan Kota Serang sebesar Rp236.474.604.475,00 atau sebesar 20.36% dari total R.APBD Kota Serang Tahun 2021, Hal ini akan berdampak pada kurangnya intervensi terhadap Program dan Kegiatan yang mendukung pada pencapaian target indikator makro dalam mendukung sasaran utama pada Tahun 2021 yaitu:
  - a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi;
  - b. Menurunnya tingkat kemiskinan;
  - c. Meningkatnya kesempatan kerja dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka; dan
  - d. Mendukung tercapainya IPM
3. Alokasi anggaran untuk mendukung Prioritas Nasional pada Prioritas **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik** yang program kegiatannya difokuskan pada Tatakelola Pemerintahan mendapat alokasi yang sangat besar dimana 5 (lima) Kabupaten/Kota mengalokasikan lebih dari 50%. Efektivitas kegiatan ini menjadi sebuah pertanyaan apabila ditelisik lebih dalam dimana



pembiayaan digunakan lebih besar untuk belanja pegawai dan belanja penunjang urusan pemerintahan yang tidak memberikan dampak langsung dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

4. Alokasi anggaran untuk mendukung Prioritas Provinsi **Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 (Delapan) Area Perubahan** (Manajemen Perubahan, Panataan Peraturan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM , Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) yang program kegiatannya difokuskan pada Tatakelola Pemerintahan mendapat alokasi yang sangat besar dimana 3 (tiga) Kabupaten/Kota mengalokasikan lebih dari 50%.
5. Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sudah melakukan sinkronisasi terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi sesuai Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, namun secara proporsi belum semua Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran memadai dalam rangka belanja yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat untuk pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pada tahun 2021 akibat dampak dari pandemi *covid-19*.

Kajian ini memberikan gambaran alokasi pembiayaan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi *covid-19* di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten pada tahun 2021. Bagi seluruh Kabupaten/Kota agar selalu konsisten dalam mengalokasikan anggaran Sinkronisasi dengan Kebijakan Pusat dan Provinsi serta agar meningkatkan proporsi belanja yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

**(Lelih Herawati, SKM, M.Kes, Fungsional Perencana Muda BAPPEDA Provinsi Banten)**